BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukkan salam suatu sisem pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur *(idle cash)* untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Pihak yang sangat berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah Bendahara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan, salah satu kewajiban Bendahara adalah melakukan pemotongan/pemuungutan pajak.

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak dan mempunyai fungsi penting antara lain untuk membiayai pembangunan negara guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Bendaharawan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam kajian ini akan dibahas lebih jauh tentang salah satu kewajiban Bendahara yaitu pemotongan/pemungutan pajak. Khususnya yang terkait dengan prosedur pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendaharawan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

1. Agar mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung teori – teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
2. Memperluas pola atau wawasan berpikir mahasiswa dengan langsung turun kelapangan dalam pelaksanaan kerja praktek ini.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pemungutan pajak pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan untuk pemotongan dan pemungutan oleh Bendaharawan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Kegunaan Kerja Praktek bagi penulis diharapkan dapat memperluas wawasan pemikiran dalam hal perpajakan. Khususnya mengenai prosedur pemotongan dan pemungutan pajak secara langsung pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

2. Bagi Perusahaan

   Kegunaan Kerja Praktek bagi perusahaan diharapkan dapat membantu sebagai sumbangan pemikiran. Sumbangan pemikiran tersebut sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan perusahaan lebih lanjut mengenai prosedur pemotongan dan pemungutan pajak secara langsung pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

3. Bagi Pihak Lain

Kegunaan Kerja Praktek bagi pihak lain yang memerlukan diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai prosedur pemotongan dan pemungutan pajak secara langsung pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam kerja praktek ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu dengan suatu metode dalam penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistemasis permasalahan yang akan dilakukan oleh penulis. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

   Yaitu untuk memperkuat landasan teoritis dalam hal data yang ada di lapangan.

   a. Observasi

      Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati keadaan sebenarnya secara langsung dilapangan selama kerja praktek berlangsung di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

   b. Wawancara

      Adalah suatu percakapan dua arah antara penulis dengan narasumber untuk memperoleh data secara langsung berkenaan

dengan prosedur pemotongan dan pemungutan pajak secara langsung pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

2. Studi Pustaka

   Yaitu dengan cara mengumpulkan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi kerja praktek

Adapun lokasi pelaksanaan kerja praktek di Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang beralamat Jalan Cianjur No 34 Bandung. Telepon kantor (022) 7278853.

1.5.2 Waktu kerja praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek lapangan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2013 sampai 30 Agustus 2013 yaitu dari hari senin sampai hari jumat, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.